

## Pangeran MBS:...

untuk menepis isu penundaan pembicaraan antara Saudi dengan Israel yang dicomblangi Amerika Serikat (AS). Hal itu dikatakan MBS saat diwawancara Fox News.

Ia menegaskan bahwa normalisasi hubungan bilateral Saudi dengan Israel terus menuju ke arah positif. Lantas bagaimana dengan isu Palestina? Sebagaimana diketahui, Israel yang notabene negara Zionis itu menjajah Palestina, negara beretnis Arab dengan mayoritas beragama Islam, sama seperti Saudi dan negara-negara berpenduduk Islam lainnya.

"Untuk kami, isu Palestina sangatlah penting. Kami perlu menyelesaikan masalah itu," kata MBS. "Kami perlu meringankan hidup mereka," ujarnya.

Israel telah menormalisasi hubungan dengan lima negara Arab, tapi pengakuan oleh Arab Saudi dinilai menjadi momen bersejarah di dunia diplomasi Timur Tengah. Soalnya, Saudi dianggap sebagai penjaga dua Kota Suci Umat Islam, Mekah dan Madinah.

Saudi juga mencari garansi keamanan dari Amerika Serikat (AS) dalam normalisasi hubungan dengan Israel itu. Kabarnya, berdasarkan

info dari AFP, ada perjanjian yang diteken antara Saudi dengan AS, namun perjanjian itu tidak dideklarasikan.

MBS berkomentar mengenai kemungkinan pakta pertahanan dengan mengatakan adanya perjanjian delapan dekade silam soal penguatan kerja sama militer dan ekonomi. Namun, dia tidak mendetailkan penjelasannya.

Bila Saudi dan Israel mesra, kontroversi tak hanya ada di sisi Saudi dan dunia Islam di belakangnya, namun juga menjadi problematik bagi AS yang getol terhadap isu Hak Asasi Manusia (HAM). Soalnya, Pangeran MBS ini dihubungkan dengan pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi yang merupakan penduduk AS juga.

Menteri Luar Negeri Antony Blinken, dalam wawancara dengan ABC News pada hari Rabu, mengatakan bahwa normalisasi antara Arab Saudi dan Israel akan menjadi "peristiwa transformatif."

"Khususnya menyatukan kedua negara ini akan mempunyai dampak yang kuat dalam menstabilkan kawasan, dalam mengintegrasikan kawasan, dalam menyatukan masyarakat, dan tidak membuat mereka saling bermusuhan," kata Blinken.

Namun dia mengakui bahwa "sulit untuk sampai ke sana." ● osm

## Polandia-Ukraina...

paikan protes atas pidato Zelensky tersebut. Seperti dilansir AFP dan Reuters, Kamis (21/9), Zelensky dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS), mengatakan bahwa Ukraina berupaya mempertahankan jalur darat untuk ekspor biji-bijian, namun dia menyebut adanya "drama politik" yang hanya membantu Rusia.

Zelensky bahkan menyebut beberapa negara berpura-pura menyatakan solidaritas dengan Kyiv. Komentarnya itu mendapatkan reaksi keras dari Polandia, yang mengecam pernyataan Zelensky itu "tidak bisa dibenarkan soal Polandia, yang telah mendukung Ukraina sejak hari-hari pertama perang".

Warsawa diketahui menjadi salah satu pendukung Kyiv yang paling setia sejak Rusia melancarkan invasinya pada Februari 2022. Namun kini kedua negara terlibat perselisihan

setelah Polandia bersama Hungaria dan Slovakia memperpanjang larangan impor biji-bijian Ukraina untuk melindungi kepentingan petani mereka.

Situasi ini berawal ketika Uni Eropa, pada Jumat (15/9) pekan lalu, mengumumkan diakhirinya larangan impor biji-bijian Ukraina di lima negara anggotanya. Penguaman itu disambut kemarahan dan memicu embargo sepihak yang ditanggapi Kyiv dengan menyatakan akan mengajukan protes ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Perdana Menteri (PM) Polandia Mateusz Morawiecki, pada Rabu (20/9) waktu setempat, memperkirakan bahwa daftar produk Ukraina yang dilarang untuk diimpor akan ditambah jika Kyiv terus

meningkatkan perselisihan soal biji-bijian.

Kementerian Luar Negeri Polandia telah memanggil Duta Besar Ukraina Vasyly Zvyahch untuk menyampaikan protes mereka. "Memberikan tekanan pada Polandia dalam forum multilateral atau menyampaikan aduan ke pengadilan internasional bukanlah metode yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan di antara negara kita," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Polandia kepada Dubes Zvyahch.

Disebutkan juga oleh Kementerian Luar Negeri Polandia bahwa Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Pawel Jablonski telah 'menyampaikan protes keras dari pihak Polandia terhadap pernyataan

yang disampaikan Presiden V Zelensky di Majelis Umum PBB kemarin, yang menuduh beberapa negara Uni Eropa berpura-pura memberikan solidaritas sambil secara tidak langsung mendukung Rusia'.

Menanggapi keberantaraan Polandia tersebut, Ukraina menyerukan kepada Polandia untuk 'mengesampingkan emosi' mereka dan mendorong Warsawa untuk mengadopsi pendekatan "konstruktif" dalam perselisihan yang terjadi. "Kami menyerukan teman-teman Polandia kami untuk mengesampingkan emosi mereka. Pihak Ukraina telah menawarkan kepada Polandia, jalur konstruktif untuk menyelesaikan masalah biji-bijian ini," sebut juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko dalam pernyataan via Facebook.

Nikolenko juga mengatakan bahwa Duta Besar Ukraina telah menjelaskan posisi Kyiv soal hal yang "tidak bisa diterima" dalam larangan yang diberlakukan Polandia dan menyarankan usulan Kyiv 'akan menjadi dasar untuk menggerakkan dialog ke arah yang konstruktif'. ● osm

## InternationalMedia

PEMIMPIN REDAKSI: Osmar Siahaan

PELAKSANA HARIAN: Lusi J, Bambang Suryo Sularto.

PENANGGUNG JAWAB: Prayan Purbata.

KORDINATOR LIPUTAN/FOTO: Sukris Priatmo.

REDAKSI: Frans G, Vitus DP, Berman LR, Bambang Suryo Sularto.

ARTISTIK: M Rifki, James Donald, Indra Saputra.

SIRKULASI-PROMOSI: A Susanto, Nurbayin, Slamet, Ahyar, Ferry.

AGEN: SOLO (ABC), BELITUNG (Naskafa Tjen), PANGKAL PINANG (Yuliani, John Tanzil), BALIKPAPAN dan SAMARINDA (Cv Gama Abadi, Alan/Tatang), MAKASSAR dan MANADO (Jefri/Meike, Jemmy), TARAKAN KALTIM (Ali), BALI (Swasti), PEKANBARU (Bob), SURABAYA, MEDAN dan PONTIANAK.

KEUANGAN/IKLAN: Citta.

BIRO BOGOR: Subagiyo (Kepala Biro), Jaidarman.

BIRO TANGERANG: Johan (Kepala Biro).

BIRO BEKASI: Madong Lubis (Kabiro),

BIRO SEMARANG: Tri Untoro.

BIRO BANDUNG: Lyster Marpaung.

BIRO BANTEN: Drs H Izul Jazuli (Kepala Biro), Stefano (Koordinator Berita Serang, Pandeglang dan Lebak).

BIRO LEBAK: Nofi Agustina (Kabiro).

BIRO JAMBI: Beni, Ratumas Sabar Riah, Rts Zuchriah.

HARGA ECERAN: Rp 2.500./eks (di luar kota Rp 3.000./eks), Harga Langganan Rp 50.000./Bulan.

PERCETAKAN: PT. International Media Web Printing

ALAMAT: Jl. Kapuk Kamal Raya No. 40-A, Jakarta Barat.

(isi di luar tanggung jawab percetakan).

Alamat Redaksi/Iklan : Gedung Guo Ji Ribao Lt 3

Jalan Gunung Sahari XI No. 291 Jakarta Pusat 10720

Tel : 021-6265566

Twitter: InternationalMedia @redaksi\_IM

## Kesehatan | 11

## Mengenal Virus Nipah, Ketahui Gejala, Cara Penularan dan Potensi Menjadi Pandemi

Virus Nipah (NiV) adalah penyakit yang mengancam dan telah menjadi sorotan dalam dunia.

JAKARTA (IM)-Negara bagian Kerala di India telah menutup sekolah, kantor, dan transportasi umum di distrik Kozhikode sebagai respons terhadap munculnya kembali virus Nipah yang berpotensi mematikan.

Keputusan pada 13 September ini diambil sebagai tindakan pencegahan terhadap penyebaran virus nipah, yang sejauh ini telah menyebabkan dua kematian dan enam kasus terkonfirmasi.

Tes yang dilakukan di Institut Virologi Nasional di Pune memastikan bahwa kematian seorang pria berusia 49 tahun di Kerala pada tanggal 30 Agustus disebabkan oleh virus Nipah. Korban kedua di negara bagian tersebut, seorang pria berusia 40 tahun, meninggal pada 11 September.

Peristiwa yang terjadi di Indonesia membuat masyarakat Indonesia perlu bersiap dan mengenali tentang virus nipah. Dalam artikel ini akan dijelaskan tentang virus

nipah, mulai dari penyebab, penularan, hingga potensi menimbulkan pandemi.

Dikutip dari situs Organisasi Kesehatan Dunia, Virus Nipah (NiV) adalah penyakit yang mengancam dan telah menjadi sorotan dalam dunia kesehatan. Penyakit ini termasuk dalam kategori zoonosis, yang berarti dapat ditularkan dari hewan ke manusia, serta memiliki potensi penularan langsung antar manusia. Artikel ini akan mengupas lebih dalam mengenai virus Nipah, gejalanya, penularannya, serta upaya pencegahan yang perlu dilakukan.

Virus Nipah pertama kali muncul di tahun 1999, saat terjadi wabah di kalangan peternak babi di Malaysia. Meskipun tidak ada wabah baru yang dilaporkan di Malaysia sejak tahun 1999, virus ini terus menjadi masalah kesehatan masyarakat di berbagai negara, khususnya di Bangladesh dan India, di mana wabah hampir setiap tahun terjadi.

Selain itu, virus ini juga

telah ditemukan di reservoir alami yang diketahui, yaitu spesies kelelawar Pteropus, di sejumlah negara termasuk Kamboja, Ghana, Indonesia, Madagaskar, Filipina, dan Thailand. Ini berarti bahwa wilayah lain juga berisiko tertular virus Nipah.

Virus Nipah memiliki beberapa cara penularan yang perlu diwaspadai. Selama wabah pertama di Malaysia, sebagian besar penularan pada manusia disebabkan oleh kontak langsung dengan babi yang sakit atau jaringan tubuh mereka yang terkontaminasi. Kontak tanpa pelindung dengan cairan babi yang tidak terlindungi juga dapat menjadi sumber infeksi.

Dalam wabah di Bangladesh dan India, penularan virus Nipah terjadi melalui konsumsi buah-buahan atau produk buah-buahan yang terkontaminasi oleh urin atau air liur kelelawar buah yang terinfeksi. Ini menunjukkan betapa pentingnya memastikan kebersihan dan keamanan makanan.

Selain itu, penularan manusia ke manusia juga telah dilaporkan, terutama di antara keluarga dan perawat pasien yang terinfeksi. Virus ini juga bisa menyebar di lingkungan layanan kesehatan, sehingga

perlu diambil tindakan pencegahan yang ketat.

Gejala infeksi virus Nipah sangat bervariasi, mulai dari infeksi tanpa gejala hingga infeksi saluran pernafasan akut dan ensefalitis yang fatal. Gejala awal termasuk demam, sakit kepala, nyeri otot, muntah, dan sakit tenggorokan. Gejala ini dapat berkembang menjadi masalah pernafasan parah, termasuk gangguan pernafasan akut, serta ensefalitis akut yang bisa berujung pada koma.

Masa inkubasi virus Nipah berkisar antara 4 hingga 14 hari, namun kadang-kadang bisa lebih lama. Tingkat kematian kasus diperkirakan mencapai 40% hingga 75%, yang dapat bervariasi tergantung pada wabah dan manajemen klinis yang ada.

Untuk diagnosis, tes utama yang digunakan adalah reaksi berantai polimerase waktu nyata (RT-PCR) dari cairan tubuh dan deteksi antibodi melalui uji imunoseror terkait enzim (ELISA). Tes lain seperti uji reaksi berantai polimerase (PCR) dan isolasi virus dengan kultur sel juga dapat digunakan.

Saat ini, belum ada obat atau vaksin yang spesifik untuk mengobati infeksi virus Nipah.

Perawatan suportif intensif dianjurkan untuk mengatasi komplikasi pernapasan dan neurologis yang parah.

Pencegahan virus Nipah pada hewan, terutama babi, melibatkan pembersihan dan disinfeksi peternakan secara rutin dan menyeluruh. Karantina kandang hewan yang terinfeksi dan penusnahan hewan yang terinfeksi mungkin diperlukan untuk mengurangi risiko penularan.

Membangun sistem pengawasan kesehatan hewan dan satwa liar, dengan pendekatan One Health, juga penting untuk mendeteksi kasus Nipah dengan cepat. Ini memungkinkan otoritas kesehatan hewan dan masyarakat untuk mengambil tindakan pencegahan yang efektif.

Dalam menghadapi ancaman virus Nipah, kesadaran masyarakat, kebersihan pribadi, dan pengelolaan keberagaman hayati menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan. Selain itu, penelitian lebih lanjut mengenai virus ini dan pengembangan vaksin yang efektif juga perlu menjadi fokus untuk mengatasi virus Nipah yang masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan manusia dan hewan. ● tom

## DARI HAL 1

## Kaesang Resmi Bergabung ke PSI?...

## SAMBUNGAN

masuk PSI?" tanya wartawan kepada Jokowi, saat groundbreaking Hotel Nusantara, di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis (21/9).

"Ya kan saya sudah sering menyampaikan. anak-anak itu kalau sudah berkeluarga itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa? Yang diputuskan sudah menjadi tanggung jawab dia,"

jawab Jokowi.

"Apakah Kaesang berdiskusi soal keinginan masuk PSI dengan Bapak?" tanya wartawan lagi.

"Ya biasa di dalam keluarga minta doa restu. Karena saya bilang tidak pun juga tetep akan jalan. Anak-anak saya seperti itu," kata Jokowi lagi.

Sementara, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengatakan akan mengecek langsung kebenaran kabar Kae-

sang Pangarep, bergabung ke PSI. Puan mengaku baru mendengar kabar Kaesang bergabung dengan PSI pada Kamis (21/9) pagi.

"Ya saya baru dengar-dengar, belum tahu, karena itu kan baru ke luar tadi pagi beritanya. Jadi saya enggak mau mengomentari sesuatu hal yang ini masih katanya-katanya atau dengar-dengar. Saya mau cek dulu kebenarannya," ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR,

Senayan, Jakarta, Kamis (21/9).

Puan akan bertanya langsung ke Kaesang perihal kabar tersebut. Puan enggan berkomentar saat ditanya soal aturan di PDI-P bahwa satu keluarga cuma boleh bergabung di satu partai. Sebab, jika betul Kaesang bergabung dengan PSI, maka berbeda dengan Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kader PDI-P. "Kita lihat dulu apakah ini benar atau tidak,"

kata Puan singkat.

Sementara Wakil Ketua Dewan Pembina DPP PSI Grace Natalie berharap Kaesang bisa bergabung dengan partainya. Namun, Grace tidak menjawab apakah sosok dalam video yang diunggah media sosial partainya itu Kaesang atau bukan. "Mirip kah? (sosok di video dengan Kaesang?) Mudah-mudahan enggak hanya mirip," kata Grace kepada wartawan. ● mar

## Polri Buru Suami Selebgram Nur Utami...

"Enggak (kenal). NU tidak kenal sama Fredy Pratama," ucap Jayadi di Lobi Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Senin (18/9).

Suami Nur, yakni S melakukan kolaborasi peredaran narkoba dengan bandar lain yang sudah ditangkap di wilayah tersebut yakni inisial WW.

"Tetapi yang kenal adalah WW. WW berkolaborasi dengan S gitu ya. Sehingga tidak langsung kepada Fredy Pratama, tetapi melalui pengendali yang ada di wilayah

Susel yaitu WW," kaya Jayadi.

Menurut Jayadi, dalam kasus ini Nur Utami hanya dijerat kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nur, tidak mengonsumsi ataupun ikut mengedarkan narkoba. Namun, Nur turut menikmati uang hasil kejahatan penjualan narkoba dari suaminya.

"Kalau NU tidak menggunakan secara langsung narkoba. Tetapi memanfaatkan aset-aset hasil dari penjualan narkoba dari S, kemudian dimonetakan atau diserahkan S kepada istrinya, untuk

membeli ataupun berinvestasi dengan pembelian barang-barang," kata Jayadi.

Polri mengungkap, ada 39 tersangka lain selain Nur yang telah ditangkap pada periode Mei-September 2023 terkait sindikat Fredy Pratama.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Wahyu Widada sebelumnya menyebut sindikat Fredy ini merupakan kasus terbesar di Indonesia.

"Setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa sindikat Fredy pratama ini adalah

sindikat narkoba yang cukup besar, mungkin terbesar," kata Wahyu dalam paparannya di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (12/9) lalu.

Semua tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, sebagiannya juga disangka pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dalam periode 2020-2023 ini, polisi juga telah menyita total Rp10,5 triliun aset dan barang bukti dari sindikat tersebut. Rinciannya, Rp 55,02

miliar aset disita dari kasus tindak pidana narkotika. Kemudian, aset senilai Rp 273,43 miliar dari hasil TPPU disita.

elanjutnya, ada barang bukti uang disita, yaitu 10,2 ton sabu yang jika dirupiahkan nilainya mencapai Rp 10,2 triliun dan 116.346 butir ekstasi yang jika dirupiahkan mencapai Rp 63,99 miliar. Namun, sebagian dari barang bukti narkoba itu ada yang sudah dimusnahkan. Sementara itu, sebagian lain masih diproses untuk nantinya dimusnahkan. ● mar

## BRIN Sebut Data Intelijen soal Parpol...

"Mendorong pengawasan yang dilakukan oleh presiden cenderung politis," ucap Haripin. Persoalan kedua, kata Haripin, adalah ketika terjadi kompetisi politik yang ketat atau terdapat kelompok oposisi yang kuat, maka presiden cenderung menggunakan badan intelijen buat bertahan dari gempuran secara politik.

"Tingginya kompetisi politik/oposisi menjadikan pengawasan intelijen oleh presiden tidak efektif karena presiden dapat memanipulasi badan intelijen untuk bertahan dari serangan oposisi," ucap Haripin.

Persoalan ketiga, kata Haripin, ketika terjadi kompetisi politik atau oposisi yang tinggi maka

presiden cenderung mengerahkan intelijen buat mengamankan kekuasaannya. Alhasil, gerakan intelijen kerap sulit dipertanggungjawabkan dan menyuburkan praktik impunitas.

"Berpotensi dapat memantik politisasi karena memberikan impunitas bagi aktivitas intelijen yang mendukung kekuasaan presiden," kata Haripin.

## DPR Panggil Jokowi

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (RSK) mendesak Komisi I dan Komisi III DPR RI memanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Badan

Intelijen Negara (BIN).

Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya Saputra mengatakan, pihaknya juga meminta audiensi pada dua komisi DPR RI tersebut.

"Kami juga mengirimkan surat terbuka yang isinya adalah analisis yang sudah kami buat terkait dengan sejumlah indikasi pelanggaran yang dilakukan Presiden," ujar Dimas di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/9).

Ia menyebut bahwa Jokowi diduga telah menyalahgunakan peran BIN. Sebab, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara tak ada tugas untuk memberikan informasi soal

partai politik (parpol).

"Didalamnya sama sekali tidak memuat soal data-data yang pada akhirnya berkaitan dengan parpol," ucapnya.

Ia menekankan, Jokowi sebagai kepala negara harus menunjukkan netralitasnya di tahun politik ini.

Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan, mengetahui arah agenda politik dari setiap parpol menjelang Pemilu dan Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Sekretaris Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu (16/9) pekan lalu.

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu,

partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi.

Memang, Presiden Jokowi tidak membeberkan informasi apa yang ia ketahui dari partai-partai politik itu. Ia hanya menjelaskan informasi itu ia dapat dari aparat intelijen yang berada di bawah kendalinya, baik itu Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, maupun Badan Intelijen Strategis (BAIS) Tentara Nasional Indonesia (TNI). "Dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada, dan itu hanya milikny presiden karena dia langsung ke saya," ujar Jokowi. ● mar

## "Dissenting Opinion", Albertina Ho Nilai...

Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK.

Sementara, Ketua Majelis Sidang Etik Harjono mengatakan, Tanak tidak terbukti melanggar Pasal 4 Ayat (1) huruf j dan Pasal 4 Ayat (2) huruf a dan b Peraturan Dewan Pengawas Nomor 03 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku.

"Menyatakan terperiaks Saudara Dr Yohanes Tanak S.H, M. Hum. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku," kata Harjono dalam sidang di ruang sidang etik di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Kamis (21/9).

Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris dalam persidangan itu mengungkapkan, pihaknya telah menemukan bukti adanya komunikasi antara Tanak dengan Sihite pada 27 Maret. Bukti itu didapatkan di antaranya dari hasil ekstraksi ponsel Sihite.

Telepon genggam itu diperiksa di Laboratorium Barang Bukti Elektronik KPK. Namun, isi percakapan itu tidak diketahui lantaran Johannis Tanak menghapus isi pesan yang dikirim kepada Sihite. Majelis Sidang Etik Dewas juga memutuskan agar martabatnya dipulihkan seperti semula. "Memulihkan hak Terperiks Sdr. Dr. Yohanes Tanak S.H., M.Hum. dalam

kemampuan dan harkat serta martabatnya pada keadaan semula," tutur Harjono lagi.

Tindakan Tanak mengahapus pesannya kepada Sihite juga dinilai karena mengetahui percakapannya memuat benturan kepentingan. Di sisi lain, Idris Sihite mengaku isi pesan yang dihapus Tanak itu di antaranya meliputi nama perusahaan. Johannis Tanak diduga melanggar etik karena menjalin komunikasi dengan Kepala Biro (Kabiro) Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) M. Idris Froyoto Sihite. Komunikasi itu diduga terjadi pada 27 Maret 2023 melalui aplikasi WhatsApp.

Adapun Sihite merupakan pihak yang berperkara karena menjadi saksi dugaan korupsi tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian ESDM. Pada hari tersebut, tim penyidik KPK tengah menggeledah kantor Sihite terkait kasus tukin.

Menurut Dewas, Tanak mengetahui posisi Sihite karena ia mengikuti gelar perkara kasus tersebut. Saat ditemui awak media pada Jumat (4/8/2023) lalu, anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengaku pihaknya belum mengetahui isi percakapan itu karena dihapus Tanak.

Sementara, Tanak menolak menyerahkan handphone miliknya untuk diperiksa Dewas KPK. "Kebetulan Pak JT (Johannis Tanak) enggak

bersedia," kata Syamsuddin saat ditemui awak media di gedung KPK lama, Kavling C1, Kuningan, Jakarta Selatan.

Sebelum memasuki tahapan sidang, hasil pemeriksaan Dewas menyatakan, dugaan pelanggaran etik Johannis Tanak cukup bukti naik ke persidangan. Albertina Ho menyebutkan, terdapat cukup bukti Tanak berkomunikasi dengan Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Idris Froyoto Sihite pada 27 Maret. Padahal, Sihite menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi yang tengah diuut KPK.

"Hal ini dikuatkan dengan fakta kehadiran saudara JT dalam ekspos perkara Kementerian ESDM pada 27 Februari 2023," ujar Albertina. ● han

bersedia," kata Syamsuddin saat ditemui awak media di gedung KPK lama, Kavling C1, Kuningan, Jakarta Selatan.

Sebelum memasuki tahapan sidang, hasil pemeriksaan Dewas menyatakan, dugaan pelanggaran etik Johannis Tanak cukup bukti naik ke persidangan. Albertina Ho menyebutkan, terdapat cukup bukti Tanak berkomunikasi dengan Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Idris Froyoto Sihite pada 27 Maret. Padahal, Sihite menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi yang tengah diuut KPK.